

Pendidikan sebagai Agen Rekonstruksi Budaya

M. Djamal

Dosen STAI An-Nawawi Purworejo

Abstract: Education can work as an effort to preserve the cultural value system to the children of the nation. This condition was done by the Old Order and New Order in order to transform the ideology. Education tries to transform knowledge in the area of reconstruction, especially the reconstruction of culture to position a new value system. With the change in the framework of human thought, the concept of culture itself will shift. Here, the importance of education as a system of meaning that is not binding (the process of liberation), humanizing, and civilizing process. This will be done properly if there is critical thinking about methodology, social structure, the rules so that no further transformation.

Keywords: *Education, Reconstruction, Culture, and Transformation.*

Pendahuluan

Interaksi manusia dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial telah melahirkan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan hasil eksternalisasi manusia untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya atau memperbaiki kualitas kehidupannya. Wujud dari kebudayaan dapat berupa sistem nilai, ideologi, hukum, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Manusia sebagai pencipta kebudayaan pada awalnya bebas dan tidak terikat, tetapi ketika telah terbentuk kebudayaan, ia menjadi tidak bebas namun terikat oleh kebudayaan yang ia ciptakan sendiri. Manusia menciptakan ideologi untuk dijadikan dasar dalam memandang segala sesuatu menjadi referensi dalam tindakan dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak akan ditemukan suatu masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan.

Sebagai bangsa yang merdeka, secara normatif Indonesia memiliki kebudayaan nasional yang berakar dari nilai-nilai luhur yang mencerminkan falsafah hidup bangsa, yakni Pancasila. Pancasila merupakan "*gentleman agreement*" telah

disepakati sebagai cita-cita moral dan ideologi negara merupakan landasan ideal yang menjiwai kebudayaan bangsa. Setiap kebudayaan baik sebagai produk, sistem nilai maupun proses, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam proses dan perkembangan, kebudayaan nasional sering tidak sejalan dengan Pancasila. Hal ini karena sesuai dengan sifat keterbukaannya dan diperkuat oleh derasnya gelombang globalisasi. Kebudayaan tampak sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh unsur-unsur budaya asing.

Secara historis, selama bertahun-tahun bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Secara langsung atau tidak langsung, penjajahan memberikan pengaruh terhadap budaya bangsa. Budayawan Ajip Rosidi pernah mengemukakan bahwa budaya Indonesia adalah budaya bawahan yang menganggap budaya bangsa penjajah sebagai budaya unggulan. Mentalitas bangsa jajahan adalah mentalitas yang selalu merasa rendah diri berhadapan dengan penguasa penjajah.¹ Mentalitas rendah diri sebagai akibat penjajahan ini ternyata telah "membudaya" di kalangan masyarakat, bahkan merupakan kelompok mayoritas bangsa. Ironisnya, rezim yang berkuasa pada masa Orde Lama dan kemudian diperkokoh oleh Orde Baru tidak memberi ruang gerak kepada masyarakat untuk bisa keluar dari situasi mental rendah diri. Mereka justru melestarikannya dengan kebijakan-kebijakan politik yang justru menekan kepada rakyat yang kritis dan berbeda pandangan dengan penguasa.

Selain rendah diri, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki mentalitas hipokrit, suka menempuh jalan pintas, tidak disiplin, dan sebagainya. Konstruksi hubungan sosial antarindividu maupun kelompok selama ini sering bersifat artifisial penuh dengan pura-pura karena fenomena yang muncul berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Jika secara lahir seseorang menyatakan setuju atas suatu keputusan, maka batinnya bisa berkata tidak; dan begitu pula sebaliknya. Sikap mental ini akan melahirkan rasa saling tidak percaya, saling mencurigai, dan pada akhirnya berpeluang memunculkan konflik horisontal dan vertikal.

Sementara itu, sikap mental suka menerabas menunjukkan kepribadian yang lemah yaitu tidak memiliki kemauan untuk berusaha, untuk bekerja keras dan mau berjuang demi mendapatkan hasil seperti yang diharapkan tanpa melawan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai penyimpangan yang terjadi seperti banyaknya kasus korupsi, kolusi, jual beli sertifikat/ijazah. Hal itu merupakan representasi dari adanya mentalitas suka menerabas. Akibatnya, hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan.

Dari segi kedisiplinan, masyarakat belum memiliki budaya disiplin. Rendahnya kedisiplinan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti tingginya angka pelanggaran lalu-lintas di jalan raya, adanya pelanggaran jam kerja oleh sebagian pegawai/karyawan di kantor-kantor, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, banyaknya siswa yang membolos sekolah, kredit macet dari para kreditor, dan sebagainya. Menurut Piliang seperti dikutip oleh H.A.R. Tilaar,² manusia Indonesia telah mengalami proses dehumanisasi. Masa Orde Lama telah melahirkan "manusia ideologi", yakni manusia yang pemikiran dan perilakunya didominasi oleh ideologi. Masa Orde Baru telah melahirkan "manusia-manusia mesin", yaitu manusia diposisikan sebagai bagian dari mesin politik, ekonomi dan lain-lain. Adapun era reformasi telah menghasilkan manusia egois dan manusia "komoditi" yang bersedia dibayar untuk demonstrasi dan pawai unjuk rasa. Sikap tidak disiplin dari sebagian anggota masyarakat telah menimbulkan banyak kerugian materiil dan nonmateriil bagi masyarakat maupun bangsa Indonesia.

Kebudayaan sesungguhnya tidak lepas dari peran pendidikan. Relasi antara pendidikan dan kebudayaan sangat erat, bahkan bersifat timbal balik. Pada satu sisi pendidikan merupakan produk dari sebuah kebudayaan, tetapi pada sisi lain pendidikan bertugas melahirkan dan melestarikan kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wujud dan bentuk kebudayaan Indonesia saat ini adalah representasi dari hasil dan prestasi pendidikan yang telah berlangsung selama ini. Persoalannya ialah apakah mentalitas bangsa kita seperti disebutkan di atas yaitu rendah diri, hipokrit, suka menempuh jalan pintas disebabkan karena faktor pendidikan? Apakah pendidikan selama ini ada kesalahan filosofis atau metodologis sehingga melahirkan mentalitas rendah bangsa kita?

Pendidikan bukan satu-satunya faktor penyebab rendahnya kualitas bangsa. Ada faktor lain yang ikut berpengaruh di dalamnya, antara lain: (1) faktor politik, apakah kebijakan politik nasional dapat menjamin adanya kehidupan yang demokratis?; (2) faktor hukum, apakah hukum dapat menjamin rasa

keadilan masyarakat dan menjamin kepastian hukum?; dan (3) faktor ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, menciptakan iklim usaha, serta mampu meningkatkan kesejahteraan sosial? Ketiga variabel tersebut akan berpengaruh terhadap wujud kebudayaan masyarakat Indonesia.

Permasalahan

Secara sosio-kultural, pendidikan merupakan proses pembudayaan kepada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkembang keimanannya, kepribadian, kecerdasan intelektual dan emosionalnya serta dapat hidup bermasyarakat dengan menghormati keanekaragaman agama, budaya dan bahasa. Pendidikan dalam perspektif ini mempunyai peran sebagai instrumen untuk melestarikan kebudayaan masyarakat. Peran ini sering disebut dengan peran konservatif atau peran statis pendidikan. Dengan peran tersebut, pendidikan berfungsi mewariskan sistem nilai budaya masyarakat kepada generasi muda agar mereka tidak mengalami kesulitan bermasyarakat yang disebabkan adanya kesenjangan budaya antara generasi muda dan generasi tua. Jika konstruksi nilai budaya masyarakat sudah baik, maju, dan produktif, tidak menjadi masalah. Akan tetapi sebaliknya, bila sistem nilai budaya yang diwariskan kepada generasi muda mengandung banyak kelemahan, maka timbul permasalahan.

Secara jujur harus diakui bahwa secara langsung atau tidak langsung produk pendidikan kita saat ini menggambarkan prototipe manusia yang belum bisa disiplin, sikap hipokrit, dan suka menempuh jalan pintas. Tugas pendidikan saat ini ialah bukan hanya sekadar mereproduksi sistem nilai dan budaya yang memperkuat mentalitas rendah tetapi justru merekonstruksi agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dari uraian tersebut, dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah kondisi pendidikan Indonesia saat sekarang?
- b. Sejauh manakah pendidikan mampu berperan sebagai agen rekonstruksi sosial budaya menuju masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat yang terhormat?
- c. Bentuk-bentuk reformasi manakah yang perlu ditempuh pendidikan?

Pendekatan

Kebudayaan telah melahirkan sistem pendidikan yang salah satu fungsinya adalah melestarikan kebudayaan melalui proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan sistem nilai kepada peserta didik atau generasi muda. Dengan demikian, kebudayaan yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tidak akan punah karena pergantian generasi. Sejauh ini, tampaknya pendidikan merupakan lembaga yang cukup efektif untuk menjalankan fungsi konservasi budaya masyarakat. Secara tidak disadari oleh masyarakat awam, pendidikan kadang-kadang dijadikan media untuk tujuan-tujuan politik tertentu demi mempertahankan *status quo*. Pendidikan juga tidak jarang dijadikan alat hegemoni kelompok dominan di masyarakat sehingga justru menjadi agen reproduksi kesenjangan sosial.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka untuk mengkaji peran pendidikan terhadap peningkatan kualitas budaya bangsa, digunakan pendekatan sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan fungsionalisme dari Robert Merton dan Talcott Parson³ yang berteori bahwa masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan. Masing-masing bagian itu menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Jika terjadi perubahan pada satu komponen akan diikuti oleh komponen yang lain yang menuju pada keseimbangan baru. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai salah satu komponen dari sistem masyarakat yang menjalankan fungsi mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan mengemban fungsi melestarikan kebudayaan masyarakat dan bangsa. Implikasinya jika fungsi ini gagal dijalankan oleh pendidikan, maka akan terjadi ketidakseimbangan masyarakat (*disequilibrium*). *Kedua*, pendekatan/teori sosial kritis⁴ yang berasumsi bahwa untuk mencapai struktur sosial yang lebih maju, baik, dan lebih adil harus ditumbuhkan sikap kritis terhadap berbagai struktur sosial, ekonomi, maupun politik yang sedang berlangsung. Peran pendidikan dimaknai tidak hanya terbatas pada fungsi konservatif yakni melestarikan kebudayaan, tetapi dielaborasi sehingga mampu berperan untuk melakukan rekonstruksi sosial budaya yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan

melakukan rekonstruksi, maka budaya yang berkembang saat ini perlu segera diganti dengan merombak sistem pendidikannya.

Kondisi Pendidikan Indonesia Dewasa Ini

Mutu pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa karena di dalamnya masih banyak persoalan yang harus diselesaikan lebih dahulu. Persoalan-persoalan mendasar di bidang pendidikan yang perlu segera mendapatkan pemecahan dalam tataran teoretis maupun praktis antara lain pandangan yang menganggap pendidikan sebagai *"banking concept"*. Menurut konsep ini, pendidikan disamakan dengan orang menabung di bank yang pada suatu saat uang tabungan itu diambil kembali. Pendidikan direduksi menjadi sekadar proses menyampaikan pengetahuan kepada anak didik yang masih seperti botol kosong, anak didik menghadiri dan mengingat pengetahuan yang sudah diterima, yang kemudian setelah mempunyai sejumlah pengetahuan berkewajiban mereproduksi melalui penilaian.

Pendidikan saat ini lebih bersifat mekanik-reduksionisme. Pendidikan diidentikkan sebagai sebuah jam besar yang memiliki proses sederhana. Bagian-bagian dari proses itu dapat diidentitikasi dan dipisahkan secara jelas bagian yang satu dengan bagian yang lain dianggap memiliki hubungan kausalitas yang bersifat linier. Paradigma tersebut telah mereduksi makna pendidikan menjadi sekolah, dan kemudian sekolah pun sudah direduksi dan disederhanakan menjadi suatu rangkaian dari ketersediaan *input*, berlangsungnya proses dan menghasilkan *output*. Kemampuan siswa juga direduksi dan disederhanakan dalam wujud skor nilai.⁵ Dengan demikian, pendidikan telah mengalami banyak reduksi dari makna aslinya yang lebih holistik. Tidak mengherankan jika Ivan Illich sudah tidak percaya kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan dan menyarankan agar sekolah-sekolah dibubarkan.⁶ Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya saat ini tidak mampu membebaskan individu dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi justru memperkuat kondisi-kondisi itu.

Pendidikan yang berlangsung saat ini, menurut Azyumardi Azra,⁷ memiliki beberapa permasalahan, yaitu: (1) Kesempatan mendapatkan pendidikan masih tetap terbatas, kesempatan memperoleh pendidikan semakin menyempit pada

pendidikan tingkat menengah dan tinggi; (2) Kebijakan pendidikan yang masih sentralistik dan menekankan uniformitas, yang mengakibatkan beban kurikulum serba seragam dan *overloaded*. Kebijakan ini tidak memberikan ruang gerak bagi kontekstualisasi dan pengembangan pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; (3) Pendanaan yang masih belum memadai untuk keperluan sarana dan prasarana serta bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya; (4) Akuntabilitas yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan kualitas pendidikan yang masih timpang; (5) Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang masih belum memadai; dan (6) Relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Praktik pendidikan selama ini menunjukkan kelemahan-kelemahan mendasar, terutama pada aspek pembelajaran yang lebih difokuskan pada aspek kognitif. Akibatnya, potensi yang lain seperti kemampuan siswa dalam aspek afektif dan psikomotor menjadi terabaikan. Model pembelajaran seperti ini telah menghasilkan *output* pendidikan yang memiliki kualitas intelektual relatif tinggi, tetapi lemah dalam kepribadian dan keterampilan. Selain itu, model pembelajaran saat ini cenderung menempatkan siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek yang sedang belajar, pendekatan lebih banyak menggunakan interaksi monolog, bukan dialog. Guru lebih aktif, sementara siswa bersikap diam, pasif, dan bersikap menunggu instruksi dari guru. Siswa jarang, bahkan tidak pernah, diajak berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai aktivitas belajar-mengajar di kelas.

Untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, maka perlu dicari jalan keluar yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengubah paradigma pendidikan dari "*banking concept*" yang menganggap siswa sebagai individu yang tidak mempunyai pengetahuan ibarat botol kosong, ke arah pendidikan yang berbasis pada konstruktivisme yang memandang siswa sebagai pribadi yang telah memiliki sejumlah pengalaman dan pengetahuan. Proses belajar tidak dipahami secara sempit sebagai transfer pengetahuan atau keterampilan tetapi dimaknai sebagai proses konstruksi

pengetahuan berdasarkan pengalaman atau konteks masyarakat dan lingkungan yang ditempati;

b. Akses mendapatkan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah yang berstatus negeri hendaknya terbuka bagi setiap orang tanpa pembatasan-pembatasan tertentu terutama karena faktor keuangan. Maka dari itu, anggaran pendidikan yang besarnya 20% dari APBN perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, bahkan jumlahnya perlu ditingkatkan. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah telah banyak membantu mereka dari keluarga kurang mampu;

c. Manajemen berbasis sekolah (MBS) yang saat ini sudah menjadi kebijakan nasional agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh di dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dengan dukungan peran serta masyarakat atau *stakeholders* sekolah. Pemerintah hendaknya tidak lagi terlalu jauh mengintervensi manajemen di sekolah; dan

d. Peningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesional guru melalui tes atau uji kompetensi dan sertifikasi guru yang dilaksanakan secara berkala agar kualitas guru tetap terjamin. Peningkatan kemampuan tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru agar secara ekonomi mereka relatif terjamin. Demikian pula bagi para dosen di perguruan tinggi, kemampuan dan kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Tokoh pendidikan nasional, Suyanto,⁸ mengemukakan bahwa sistem pendidikan perlu diperbaiki terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi yang memungkinkan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat; *Kedua*, pendidikan nasional hendaknya memiliki misi yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga mereka menjadi masyarakat yang terdidik; *Ketiga*, substansi pendidikan khususnya pendidikan dasar diarahkan pada pengembangan potensi dan kreativitas anak didik. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar tidak hanya mengacu pada aspek kognitif; *Keempat*, substansi pendidikan nasional di jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi diarahkan pada pengembangan individu secara vertikal (struktur keilmuan) dan horisontal (keterkaitan dan

relevansi antarbidang keilmuan). Dan, *kelima*, perlu dikembangkan sistem pembelajaran secara egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan dalam kelas atas dasar kemampuan akademik.

Pendidikan Untuk Rekonstruksi Sosial

Fungsi Pendidikan

Pendidikan selalu berada dalam *setting* sosial dan historis tertentu, maka pendidikan tidak pernah lepas dari ideologi dan kepentingan-kepentingan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dalam masyarakat kapitalis, pendidikan memiliki misi utama untuk menjaga kepentingan/ideologi kapitalisme. Sebaliknya, di negara-negara yang berideologi sosialis/komunis, pendidikan diarahkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat yang bercorak sosialis. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendidikan tidak pernah bersifat netral, yakni tidak memihak atau dipengaruhi oleh konstelasi ideologi tertentu.

Pendidikan dilihat dari perspektif filosofi politik dapat digolongkan menjadi dua macam. *Pertama*, ideologi konservatif yang terdiri dari tiga model, yaitu: (1) fundamentalisme pendidikan; (2) intelektualisme pendidikan; dan (3) konservatisme pendidikan. *Kedua*, ideologi liberal, meliputi: (1) liberalisme pendidikan; (2) liberasionisme pendidikan; dan (3) anarkisme pendidikan.⁹ Ideologi konservatif merupakan ideologi pendidikan yang cenderung untuk mempertahankan sistem sosial politik dan budaya yang telah berlaku. Untuk varian fundamentalisme pendidikan diarahkan untuk menerima tanpa kritik terhadap kebenaran wahyu atau konsensus yang sudah mapan. Fundamentalisme pendidikan dapat berkembang menjadi dua variasi, yaitu fundamentalisme pendidikan religius dan fundamentalisme sekuler. Pada varian intelektualisme pendidikan, misi pendidikan adalah dalam rangka mengubah praktik-praktik pendidikan agar sesuai dengan cita-cita intelektual atau ruhaniah yang sudah mapan. Konservatisme pendidikan berada pada posisi mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga atau proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu, serta menghormati aturan hukum sebagai landasan perubahan sosial yang konstruktif.¹⁰

Kelompok ideologi liberalisme seperti disebutkan di atas yang terdiri atas tiga subkelompok, masing-masing secara singkat dapat dijelaskan sebagai

berikut. *Pertama*, liberalisme pendidikan yang menganggap bahwa tujuan jangka panjang pendidikan adalah untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada. *Kedua*, liberasionisme pendidikan, yakni bahwa pendidikan diorientasikan pada perombakan terhadap tatanan sosial politik yang ada sebagai cara untuk memajukan kebebasan individu dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. *Ketiga* anarkisme pendidikan yang berpandangan bahwa pendidikan harus menekankan perlunya meminimalkan atau menghapuskan pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal/individu. Dengan kata lain, pendidikan bertugas justru untuk membuat masyarakat bebas dari lembaga. Sejalan dengan itu, dikatakan bahwa pendekatan terbaik terhadap pendidikan adalah pendekatan yang mengupayakan untuk mempercepat perombakan humanistik berskala besar, dengan menghapus sistem persekolahan sekalipun.¹¹

Tokoh lain, John S. Brubacher,¹² tncnyebutkan bahwa pendidikan dilihat dari perspektif tatanan sosial (*social order*) memiliki tiga macam fungsi. *Pertama*, fungsi konservatif, yakni bahwa pendidikan berfungsi untuk menjaga dan melestarikan eksistensi sistem sosio-kultural. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan harus berisi kandungan sistem nilai budaya masyarakat atau bangsa. *Kedua*, fungsi progresif, yaitu bahwa tugas utama pendidikan adalah menumbuhkan inisiatif dan tanggung jawab kepada anak didik untuk memajukan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Adapun fungsi ketiga pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual individu. Untuk itu, pendidikan harus bebas dan netral, khususnya dari pengaruh-pengaruh politik.

Dengan menggunakan pendekatan filosofis maupun pendekatan *social order* seperti diuraikan, maka dapat melihat dan sekaligus membuat kategori sistem pendidikan yang dipraktikkan di suatu negara menganut paham konservatif, progresif, atau liberalisme dengan segala variannya. Selain itu, ada gambaran mengenai ada tidaknya hubungan antara ideologi pendidikan dengan kualitas pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan tampaknya lebih cenderung memosisikan diri sebagai lembaga atau instrumen yang menjalankan fungsi konservatif. Fungsi ini dapat dilihat dari praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan khususnya yang berlangsung mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan menengah diarahkan pada pemahaman dan apresiasi terhadap sistem

nilai dan budaya bangsa. Di sekolah-sekolah, anak didik mendapatkan materi pelajaran yang bersumber dari pengetahuan, nilai-nilai dan tradisi yang sudah mapan dan dipelajari secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya yang mengatur kehidupan bersama diajarkan kepada anak didik agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan sistem nilai budaya yang dikembangkan saat ini melalui lembaga-lembaga pendidikan, ternyata mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, antara lain bidang ekonomi, perdagangan, informatika, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Bahkan, dari aspek moral, berada dalam kondisi sangat buruk seperti kasus korupsi terjadi di hampir semua lini, kasus pemerkosaan dan pembunuhan semakin meningkat, dan disiplin masyarakat sangat rendah. Oleh sebab itu, fungsi pendidikan harus diperbaiki, dari fungsi yang semata-mata bersifat konservatif, menjadi fungsi baru yang bersifat rekonstruktif. Pendidikan menjalankan fungsi melestarikan sistem nilai budaya masyarakat/bangsa dan juga bertugas mengkonstruksi sistem nilai budaya baru yang lebih baik. Rekonstruksi budaya tidak berarti selalu meninggalkan sama sekali budaya yang telah ada, tetapi menggunakan unsur-unsur budaya lama yang masih relevan untuk membangun sistem budaya baru.

Pendidikan Transformatif

Kebudayaan dalam pemikiran filsafat pragmatis merupakan sebuah realitas yang terus-menerus berubah. Kebudayaan selalu di dalam proses rekonstruksi, yaitu membangun dan memperbaiki kebudayaan yang sudah ada.¹³

Dengan demikian, kebudayaan bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan, aliran pemikiran pendidikan yang berorientasi pada perubahan kebudayaan sering disebut rekonstruksionisme. Menurut aliran ini, pendidikan dilaksanakan dengan tujuan melakukan rekonstruksi kebudayaan. Dalam tataran praksis, pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dituntut memberikan peluang kepada peserta didik untuk memahami dan merekonstruksi kebudayaannya. Konsekuensinya, proses belajar dilaksanakan secara interaktif, kreatif, dan kritis. Tenaga pengajar memposisikan diri bukan sebagai orang

yang serba tahu, yang memandang anak sebagai objek, melainkan menjalankan peran sebagai fasilitator dan motivator.

Proses belajar interaktif adalah proses belajar yang membangun hubungan interaktif dan dialogis antara tenaga pendidik dan peserta didik. Dalam suasana interaktif inilah dapat dikembangkan sikap kreatif dan kritis dari peserta didik. Dengan sikap kritis tersebut peserta didik dapat merekonstruksi kebudayaannya. Dengan demikian, rekonstruksi kebudayaan hanya akan terjadi dalam proses pendidikan yang membangun kreativitas dan sikap kritis peserta didik. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, orientasi pendidikan menunjukkan dengan jelas bahwa proses pendidikan juga merupakan proses kebudayaan, sebab proses pendidikan terjadi dalam konteks kebudayaan.

Proses pendidikan yang berfungsi merekonstruksi kebudayaan adalah yang memungkinkan peserta didik mampu memberi makna (*meaning*) terhadap lingkungan atau kehidupan. Selama ini, apa yang dipahami dan dimengerti anak didik tentang kehidupan dan realitas sosial adalah arti yang diberikan oleh pendidik/guru. Pendidik atau gurulah yang memaksakan arti tentang kehidupan dan realitas kepada peserta didik. Oleh sebab itu, harus dihindari proses pendidikan yang distruktur melalui kurikulum secara baku, metodologi baku, aturan-aturan yang baku sehingga anak didik hanya mementingkan ingatan dan hafalan. Proses pendidikan yang hanya mementingkan ingatan dan hafalan tidak akan mengubah anak didik menjadi pribadi yang kritis dan kreatif. Pendidikan dapat berfungsi sebagai agen rekonstruksi kebudayaan apabila memandang anak didik sebagai pribadi yang utuh.

Penutup

Pendidikan merupakan refleksi kebudayaan yang dikonstruksi sebagai instrumen yang berfungsi melestarikan sistem nilai budaya kepada generasi muda agar tidak terjadi ketegangan nilai yang dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Pelestarian nilai-nilai tersebut dilakukan melalui proses transfer pandangan hidup, norma-norma sosial, kesusilaan, adat, pengetahuan, dan teknologi dari para pendidik kepada peserta didik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Jika fungsi pendidikan hanya untuk melestarikan kebudayaan, maka kebudayaan menjadi sangat statis dan tidak mengalami perubahan dan pembaruan.

Pendidikan yang demikian lebih cenderung menjadi alat untuk mempertahankan budaya dominan yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau bahkan menjadi alat kekuasaan sebuah rezim yang lalim. Oleh sebab itu, pendidikan dituntut mampu memainkan peran sebagai agen rekonstruksi sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial budaya yang tidak relevan seperti sikap mental rendah diri, suka menempuh jalan pintas, Sikap munafik dan lain-lain perlu dikonstruksi ulang karena telah terbukti bersifat kontraproduktif bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan dapat menjalankan fungsi rekonstruksi budaya apabila mau mengubah praktik-praktik pendidikan yang kurang baik selama ini, seperti penekanan hanya pada aspek kognitif, proses belajar tidak interaktif, sikap kritis siswa tidak dikembangkan, dan lain-lain. Untuk itu, pendidikan harus dimaknai sebagai proses pembebasan, humanisasi, dan pembudayaan.

Endnotes

¹ www.kompas.com/kompas-cetak'04.

² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pedagogik Transformatif Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2002).

³ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 50-51.

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

⁵ Zamroni, *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 35.

⁶ Keterangan lebih lengkap dapat dibaca buku karya Ivan Illich, *Bebas Dari Sekolah*, Terj. C. Woekirsari (Jakarta: Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, 1982).

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. xv.

⁸ Suyanto, "Tantangan Global Pendidikan Nasional", dalam Ikhwanuddin Syarief, *et al. Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 119-120.

⁹ William F. O'Neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 99.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 105-109.

¹¹ *Ibid.*, hal. 108-112.

¹² John S. Brubacher, *Modern Philosophies of Education* (New York: McGraw-Hill, Inc. 1969), hal. 11-19.

¹³ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial...*, hal. 265.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Brubacher, John S. 1962. *Modern Philosophies of Education*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Illich, Ivan. 1982. *Bebas Dari Sekolah*, Terj. C. Woekirsari. Jakarta: Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- O'Neil, William F. 2001. *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto. 2002. "Tantangan Global Pendidikan Nasional", dalam Ikhwanuddin Syarief, et al. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pedagogik Transformatif Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Zamroni. 2002. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Mewujudkan Peradaban Bangsa*. Jakarta: PT Grasindo.
- www.kompas.com/kompas-cetak/04.